

DAFTAR PUSTAKA

- 'Athoillah, Ahmad Althof dan Alfan Khairul Ichwan. "Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 2, no. 2 (August 22, 2024): 45-60.
- Abdurrahman, Danna Muhammad Bagas dan Dani Muhtada. "Analisis Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Sumber Daya dan Kinerja Perangkat di Desa Gandon Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung." *Jurnal Demokrasi dan Pembangunan Desa* 5, no. 1 (June 30, 2025): 20-35.
- Adam, Fahmi. *Kepemimpinan Muda dalam Dinamika Politik dan Pembangunan*. Cirebon: Green Publisher Indonesia, 2024.
- Adnan, La Ode & Rizki Mustika Suhartono. "Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2, no. 1 (July 07, 2024): 142-154.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Min Fiqh al-Daulah di al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001).
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Siyasah al-Syariyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2021.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*, Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Badan Pusat Statistik. "Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen". Diakses 29 Agustus 2025.

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html?u>

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2011.
- Dwiyanto, Agus. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fadilah, Hilwa Nurrahmah, dkk. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun." *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (May 10, 2025): 3078-3090.
- Fajari HS, Muhammad Noor. "Implementasi Permendes PD TT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* 3, no. 3 (July 30, 2025): 2600-2611.
- Faudi, Anang, Siti Afiyah, dan Moh. Hudi. "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024." *Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (August 26, 2025): 129-146.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Handriani, H., Frinaldi A., Magriasti L., & Naldi, H. "Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa di Indonesia." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 11, no. 2 (December 03, 2024): 601-608.
- Hartono, Hasim. "Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi dan Demokrasi." *Jurnal Intelek Insan Cendekia* 1, no. 6 (August 19, 2024); 2161-2169.
- Hidayat, Rofiq. "ICW Beberkan Tiga Masalah Mendasar dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa." *Hukumonline.com*. 27 Januari 2023. Diakses 29 Agustus 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/icw-beberkan-tiga-masalah-mendasar-dalam-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-lt63d3a4911fe68/?page=2>
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2012.
- Kallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Terjemah oleh Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2021.
- Lembaga Administrasi Negara. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: LAN, 2003.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, & Johnny Saldana. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemah oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UII Press, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Montesquieu. *The Spirit of Laws*. Berkeley: University of California Press, 1977.
- Muh Saldi, dkk. "Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sistem Demokrasi di Indonesia." *Journal of Lex Philosophy* 5, no. 2 (December 20, 2024): 1305-1320.
- Padilah, Ahirul Habib, dkk. "Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Dinamika Masa Jabatan 8 Tahun." *Journal of Administration, Governance, and Political Issues* 2, no. 1 (May 07, 2025): 61-70.
- Qoiriya, Rinda Anissa dan Ahmad Junaidi. "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Politik Hukum dan Masalah Mursalah." *Jurnal Politik Hukum Islam* 4, no. 1 (June, 2025): 75-90.
- Q.S. An-Nisa (4): 58.
- Ramadhani, Desta Angga, dkk. "Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional." *Journal of Constitutional Law* 4, no. 3 (October 31, 2024): 340-348.
- Ratmono, Andrian Juli, Oman Rusmana, & Uswatun Hasanah. "Tinjauan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (JAKMAN)* 4, no. 4 (September 5, 2023): 273-286.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7.
- Riyadi, Deddy Supriyadi dan Deddy S. Bratakusumah. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Rosita, Lita. "Election of Villages Heads as a Framework for Democracy within the Framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia." *Jurnal Ruang Hukum* 2, no. 2 (November 08, 2023): 43-48.
- Rubaidi, R. *Hukum Pemerintahan Desa: Dinamika Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Saragih, Jopinus Ramli. "Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa." *Jurnal Administrasi Bisnis* 10, no. 1 (June 28, 2024): 132-142.
- Sauyai, Mada Ishak David, dkk. "Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024." *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 5, no. 4 (November 13, 2024): 183-197.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik): Bagian Kedua – Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 2006.
- Strong, C.F. *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. London: Sidgwick & Jackson Ltd, 1963.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sukarja, Ahmad. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Taufik, Muhammad dan Heruddin. "Perspektif Fikih Siyasah terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (December 26, 2023): 105-126.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 9.
- UNDP. *Governance for Sustainable Human Development*. (new York: UNDP, 1997).

- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- World Bank. *Governance and Development*. Washington D.C.: The World Bank, 1992.
- World Bank. *Sub-Sahara Africa: From Crisis to Sustainable Growth*. Washington D.C.: The World Bank, 1989.
- Yasin, Mohd. "Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. 11 (December 10, 2023): 120-135.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Terjemah oleh M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.